

RENCANA KERJA
(RENJA)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan Kehadirat ALLAH SWT yang mana Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja dan mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022.

Kedepan diharapkan Rencana Kerja ini akan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan APBD Tahun 2022, dan kami juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2022.

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam pembangunan Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung akan terus berupaya lebih membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini akan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 2021

KEPALA BADAN,



Drs. M. FIRSADA, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

DAFTAR ISI

	<i>hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I.1
B. Landasan Hukum	I.1
C. Maksud dan Tujuan	I.4
D. Sistematika Dokumen RENJA	I.5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra	II.1
B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.5
C. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II.6
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II.10
E. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan	II.21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
A. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional	III.1
B. Tujuan dan Sasaran Renja	III.3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel.	II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2020 dan Capaian Renstra SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
Tabel.	II.2	Analisa Kinerja Pelayanan OPD s.d Tahun 2020 Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
Tabel.	II.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
Tabel.	III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel.	IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Renja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan program kegiatan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2022, yang tetap berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun bersangkutan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat tujuan, sasaran, arah dan kebijakan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, serta rencana-rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran anggaran yang harus dicapai dalam rangka mengemban tujuan dan sasaran Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, melalui suatu rencana aksi yang merupakan rencana pelaksanaan program-program strategis yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Kerukunan Umat Beragama;
10. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Filitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
15. Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kesadaran Bela Negara;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
17. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
20. Permendagri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
21. Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
22. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
23. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
26. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
29. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan kinerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung sebagai perencanaan bagi pencapaian tujuan, pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, tujuan dan sasaran Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung, dan kebijakan serta sebagai salah satu upaya terciptanya pertanggungjawaban Kinerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung secara terukur untuk periode Tahun 2022.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai acuan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien sesuai kebijakan dan strategi Badan Kesbang dan Politik dalam rangka penyusunan satu tahunan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2020

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan telaahan usulan program/ kegiatan dari pemangku kepentingan pembangunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung selama tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2019-2024. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program dan kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2020 berdasarkan LKj 2020 yang sudah disusun menetapkan satu sasaran strategis, dua indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2020 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2020 pencapaian realisasi fisik sebesar 89,2% dan realisasi keuangan 80,87%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2

**Analisa Kinerja Pelayanan OPD s.d Tahun 2020
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	TAHUN 2019		CAPAIAN	TAHUN 2020		CAPAIAN
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Hak-Hak Politik Provinsi Lampung	%	64	59,53	93,02	64,25	63,70	99,14
2	Prosentase Penurunan Konflik Sosial di Provinsi Lampung	%	15	15	100	15	15	100

Dari uraian tabel di II.2 di atas terjadi peningkatan indeks hak-hak politik Provinsi Lampung sebesar 4,17 point, yang semula tahun 2019 sebesar 59,53 dan pada tahun 2020 menjadi 63,70 dan capaian terhadap target kinerja tahun 2020 sebesar 99,14 %, sedangkan penurunan potensi konflik di Provinsi Lampung sebesar 20% tercapai pada tahun 2020.

C. Isu-Isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pada tahun 2022 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2019-2024, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama”.

2. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, maka masalah- masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Lampung berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Bidang Politik Dalam Negeri :
 - 1) Tingginya dinamika perkembangan politik di Provinsi Lampung;
 - 2) Belum optimalnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Pendidikan Budaya Politik di Provinsi Lampung;
 - 3) Rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan/ stekholder kepemiluan di Provinsi Lampung;
 - 4) Minimnya wawasan hak-hak politik dan kebebasan politik perempuan, kaum difabel, pemilih pemula dan kaum muda milenial di Provinsi Lampung.
- b. Bidang ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
 - 1) Menurunnya pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Provinsi Lampung;
 - 2) Masih terdapatnya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain;
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional
 - 1) Masih banyaknya potensi konflik sosial, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung;
 - 2) Masih lemahnya koordinasi antar instansi/ lembaga dalam pendataan dan pamantauan Warga Negara Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung.
- d. Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan:
 - 1) Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, khususnya dikalangan generasi muda di Provinsi Lampung;

- 2) Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama dan konflik pendirian tempat ibadah;
- 3) Meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang di Provinsi Lampung.

3. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas di daerah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan secara salah.
- g. Masih tingginya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang di Provinsi Lampung.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
 - c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat di Provinsi Lampung dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
 - d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
 - e. Stabilitasnya sistem politik di Provinsi Lampung sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis; dan
 - f. Sudah terbentuknya tim P4GN di Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung
4. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Provinsi Lampung tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
- b. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
- c. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih

pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.

- d. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
- e. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
- f. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi menghadapi pandemi Covid-19.
- g. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas pada masa pandemi Covid-19.
- h. Melakukan sosialisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat terlarang.

D. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun pada tahun 2020 tidak terdapat usul program/ kegiatan dari pemangku kepentingan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

**Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Badan Kesbangpol dan Politik Provinsi Lampung
Periode Pelaksanaan Januari s/d Desember 2019**

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2018		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Tahun 2019		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
1	05.04.15.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	60	287,200,000.00	12	106,400,000.00	12	112,000,000.00	12	107,475,000.00	100	95.96	24	213,875,000.00	40	74.47
2	05.04.15.001	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya benda pos, bahan bacaan dan paket pengiriman	60	209,270,000.00	12	37,260,000.00	12	30,000,000.00	12	28,000,000.00	100	93.33	24	65,260,000.00	40	31.18
3	05.04.15.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, internet, listrik dan air	60	1,907,250,000.00	12	292,096,163.00	12	298,000,000.00	12	270,164,636.00	100	90.66	24	562,260,799.00	40	29.48
4	05.04.15.010	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	60	271,200,000.00	12	26,600,000.00	12	36,000,000.00	12	35,651,800.00	100	99.03	24	62,251,800.00	40	22.95
5	05.04.15.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	258,045,000.00	12	18,620,000.00	12	18,000,000.00	12	17,999,500.00	100	100	24	36,619,500.00	40	14.19
6	05.04.15.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan listrik	60	51,000,000.00	12	13,740,000.00	12	10,000,000.00	12	9,980,000.00	100	99.8	24	23,720,000.00	40	46.51
7	05.04.15.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	300,400,000.00	0	0	4	37,649,000.00	4	37,500,000.00	100	99.6	4	37,500,000.00	25	12.48
8	05.04.15.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan kebersihan kantor.	60	51,000,000.00	12	7,980,000.00	12	6,000,000.00	12	5,960,000.00	100	99.33	24	13,940,000.00	40	27.33
9	05.04.15.019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya jasa tenaga harian lepas	60	456,000,000.00	12	122,443,000.00	12	120,284,000.00	12	118,484,000.00	100	98.5	24	240,927,000.00	40	52.83
10	05.04.15.022	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terfasilitasinya koordinasi kesbangpol se-prov. lampung	60	419,625,000.00	12	206,334,300.00	12	175,590,000.00	12	174,040,200.00	100	99.12	24	380,374,500.00	40	90.65
11	05.04.15.017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	tersedianya snack dan minum pegawai.	60	730,400,000.00	0	0	12	25,306,000.00	12	18,362,200.00	100	72.56	12	18,362,200.00	20	2.51

12	05.04.15.018	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya koordinasi ke luar daerah aparatur Kesbangpol	60	440,350,000.00	12	253,535,000.00	12	234,956,000.00	12	231,010,150.00	100	98.32	24	484,545,150.00	40	110.04
13	05.04.15.056	Penatausahaan Aset Daerah	tersedianya jasa pengelola aset dan data base aset kesbangpol.	60	185,000,000.00	12	27,706,000.00	12	52,640,000.00	12	52,565,000.00	100	99.86	24	80,271,000.00	40	43.39
14	05.04.16.018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	5	250,000,000.00	0	0	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	100	100	1	45,000,000.00	20	18
15	05.04.16.020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	32	927,120,000.00	8	173,042,300.00	8	179,650,000.00	8	172,293,060.00	100	95.9	16	345,335,360.00	50	37.25
16	05.04.17.006	Pembinaan mental aparatur	meningkatnya keimanan aparatur kesbangpol	40	55,000,000.00	4	8,350,000.00	4	6,998,000.00	4	6,928,000.00	100	99	8	15,278,000.00	20	27.78
17	05.04.16.042	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan elektronik	terpeliharanya peralatan elektronika kantor	46	86,000,000.00	40	14,000,000.00	50	12,980,000.00	50	12,980,000.00	100	100	90	26,980,000.00	195.65	31.37
18	05.04.19.003	Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	meningkatnya pengetahuan dan tekhnis aparatur	50	250,000,000.00	6	6,030,000.00	6	54,000,000.00	6	14,485,000.00	100	26.82	12	20,515,000.00	24	8.21
19	05.04.17.018	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	tersedianya pakaian dinas harian aparatur	320	143,500,000.00	0	0	80	31,500,000.00	80	29,700,000.00	100	94.29	80	29,700,000.00	25	20.7
20	05.04.15.029	Pameran dan Promosi Pembangunan	terlaksananya pameran promosi pembangunan.	22	1,200,000,000.00	4	147,855,000.00	4	179,210,800.00	2	87,000,000.00	50	48.55	6	234,855,000.00	27.27	19.57
21	05.04.20.001	Penyusunan laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	60	485,000,000.00	0	0	12	10,904,000.00	12	10,904,000.00	100	100	12	10,904,000.00	20	2.25
22	05.04.20.007	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD-	tersedianya laporan realisasi keuangan dan kinerja	60	625,000,000.00	3	56,066,000.00	3	6,032,000.00	3	6,032,000.00	100	100	6	62,098,000.00	10	9.94
23	05.04.20.075	Penyusunan Program Kegiatan, Evaluasi, dan Laporan Akhir Tahun Anggaran	tersusunnya laporan tahunan, LPPD, Lakip, Renja, RKT, Evaluasi Renja, RKA, DPA, Renstra	28	600,000,000.00	0	0	5	172,749,000.00	5	163,555,000.00	100	94.68	5	163,555,000.00	17.86	27.26
24	06.01.15.001	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung	terfasilitasinya kegiatan FKUB Prov. Lampung	50	1,450,000,000.00	3	58,653,700.00	3	223,600,000.00	3	203,888,910.00	100	91.18	6	262,542,610.00	12	18.11

25	06.01.15.002	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung	terfasilitasinya kegiatan FPK Prov. Lampung	48	1,350,000,000.00	2	25,000,000.00	2	175,700,000.00	2	168,430,000.00	100	95.86	4	193,430,000.00	8.33	14.33
26	06.01.15.010	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Lampung	terfasilitasinya kegiatan PPWK Prov. Lampung	48	1,550,000,000.00	8	81,565,000.00	8	568,010,800.00	8	561,246,900.00	100	98.81	16	642,811,900.00	33.33	41.47
27	06.01.18.004	Fasilitasi FKDM Provinsi Lampung	terfasilitasinya FKDM Prov. Lampung	48	1,250,000,000.00	6	94,000,000.00	6	147,610,000.00	6	144,624,056.00	100	97.98	12	238,624,056.00	25	19.09
28	06.01.18.008	Deteksi Dini, Cegah Dini dan Penanganan Konflik	Terkondisinya masalah konflik dan unjuk rasa serta bantuan pemulihan pasca konflik di Provinsi Lampung.	58	1,400,000,000.00	6	273,460,200.00	6	300,000,000.00	6	284,072,600.00	100	94.69	12	557,532,800.00	20.69	39.82
29	06.01.18.010	Fasilitasi Fuldasis Provinsi Lampung	terfasilitasinya fuldasis Provinsi Lampung.	60	5,000,000,000.00	0	0	12	211,300,000.00	12	165,800,000.00	100	78.47	12	165,800,000.00	20	3.32
30	06.01.18.011	Dialog Penanganan WNA dan Ormas Asing serta Pencari Suaka	Terlaksananya Dialog Penanganan WNA dan Ormas Asing serta Pencari Suaka.	600	650,000,000.00	0	0	100	100,000,000.00	100	75,556,000.00	100	75.56	100	75,556,000.00	16.67	11.62
31	06.01.20.001	Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah dengan Intelkam dan Forum/Elemen Masyarakat bidang Kesatuan Bangsa Se-Provinsi Lampung	terciptanya koordinasi yang baik dan harmonis antara Pemda Provinsi Lampung dengan Intelkam dan Mitra Kerja Bidang Kesatuan Bangsa se-Provinsi Lampung	60	1,900,000,000.00	4	46,326,291.00	4	68,923,600.00	4	59,370,800.00	100	86.14	8	105,697,091.00	13.33	5.56
32	06.01.20.003	Monitoring dan Pengendalian Stabilitas Daerah	Terciptanya keamanan dan situasi kondisi daerah yang kondusif	60	6,000,000,000.00	11	74,564,200.00	11	584,000,000.00	10	476,001,200.00	90.91	81.51	21	550,565,400.00	35	9.18
33	06.01.21.001	Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	Terpantaunya perkembangan politik pada pra, saat dan pasca pemilu.	16	1,700,000,000.00	6	597,354,899.00	6	421,854,000.00	6	409,159,450.00	100	96.99	12	1,006,514,349.00	75	59.21
34	06.01.21.003	Pemeriksaan Berkas Persyaratan, Pemutakhiran Data, Peninjauan Lokasi dan Monitoring Kelembagaan Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung	Tercapainya tertib administrasi dalam rangka penyediaan data keberadaan Orpol, Orkemas dan LSM di Prov. Lampung sebanyak 50 Surat Keterangan Terdaftar	60	750,000,000.00	2	59,448,150.00	2	164,300,000.00	2	121,019,037.00	100	73.66	4	180,467,187.00	6.67	24.06

35	06.01.21.004	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung	Tercapainya kinerja Demokrasi Provinsi Lampung yang berdasarkan Indeksi 3 Aspek IDI (Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi).	17	850,000,000.00	2	87,500,000.00	2	50,309,000.00	2	48,221,000.00	100	95.85	4	135,721,000.00	23.53	15.97
36	06.01.21.005	Pokja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan PAW Kab/Kota se- Provinsi Lampung	Diperolehnya data anggota DPRD yang telah memenuhi per UU yang berlaku.	30	900,000,000.00	8	49,686,400.00	8	0	0	0	0	0	8	49,686,400.00	26.67	5.52
37	06.01.21.006	Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Provinsi	Terciptanya tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Parpol di Provinsi Lampung	60	1,000,000,000.00	2	93,681,900.00	2	51,460,000.00	2	51,460,000.00	100	100	4	145,141,900.00	6.67	14.51
38	06.01.21.007	Sosialisasi Undang Undang Pemilu dan Pemilukada	Terlaksananya Sosialisasi UU Pemilu dan Pemilukada	600	700,000,000.00	0	0	3	93,490,000.00	3	90,848,950.00	100	97.18	3	90,848,950.00	0.5	12.98
Rata-Rata capaian kinerja %												95.81	90.03			32.06	27.77
Predikat kinerja												sangat tinggi	sangat tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Monitoring Faktor																	
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja				Rencana Aksi Program/Kegiatan Tahun 2019 dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Prov. Lampung													
Faktor penghambat pencapaian kinerja				-													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				-													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				Penataan anggaran yang sesuai dengan target rencana kerja dan pelatihan teknis dan non teknis masih perlu dilanjutkan pada tahun berikutnya													

**Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Badan Kesbangpol dan Politik Provinsi Lampung
Periode Pelaksanaan Januari s/d Desember 2020**

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2019		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Tahun 2020		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
1	06.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	500	1,440,000,000.00	0	0	100	324,120,000.00	100	265,366,733.00	100	81.87	100	265,366,733.00	20	18.43
2	06.01.01.002	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	layanan administrasi keuangan	500	560,000,000.00	0	0	100	152,736,000.00	100	151,732,000.00	100	99.34	100	151,732,000.00	20	27.1
3	06.01.01.003	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	layanan kebersihan kantor	500	94,000,000.00	0	0	100	13,500,000.00	100	13,500,000.00	100	100	100	13,500,000.00	20	14.36
4	06.01.01.005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	pengadaan alat tulis kantor	500	221,000,000.00	0	0	100	33,000,000.00	100	32,999,400.00	100	100	100	32,999,400.00	20	14.93
5	06.01.01.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan	500	221,000,000.00	0	0	100	25,000,000.00	100	24,933,180.00	100	99.73	100	24,933,180.00	20	11.28
6	06.01.01.007	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	25	1,250,000,000.00	0	0	5	209,473,900.00	5	209,050,000.00	100	99.8	5	209,050,000.00	20	16.72
7	06.01.01.008	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Listrik	Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	500	74,000,024.00	0	0	100	15,632,400.00	100	14,589,400.00	100	93.33	100	14,589,400.00	20	19.72
8	06.01.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	layanan makan dan minum	500	102,000,000.00	0	0	100	25,235,000.00	100	19,775,000.00	100	78.36	100	19,775,000.00	20	19.39
9	06.01.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah koordinasi dan konsultasi	300	2,170,000,000.00	0	0	60	796,936,000.00	60	771,420,500.00	100	96.8	60	771,420,500.00	20	35.55
10	06.01.01.013	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga PTHL	25	481,136,120.00	0	0	5	122,750,000.00	5	98,850,000.00	100	80.53	5	98,850,000.00	20	20.55
11	06.01.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	375,000,000.00	0	0	1	75,000,000.00	1	74,655,000.00	100	99.54	1	74,655,000.00	20	19.91
12	06.01.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35	898,250,000.00	0	0	7	75,950,000.00	7	70,680,956.00	100	93.06	7	70,680,956.00	20	7.87
13	06.01.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25	160,000,000.00	0	0	5	21,400,000.00	5	21,400,000.00	100	100	5	21,400,000.00	20	13.38
14	06.01.03.001	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	150	270,000,000.00	0	0	30	27,000,000.00	15	9,545,000.00	50	35.35	15	9,545,000.00	10	3.54
15	06.01.03.002	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	jumlah dokumen pemuktahiran Anjab, ABK, Eviab dll	20	292,000,000.00	0	0	4	17,033,000.00	4	15,732,800.00	100	92.37	4	15,732,800.00	20	5.39
16	06.01.04.001	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	jumlah dokumen pelaporan dan Evaluasi Kinerja	40	450,000,000.00	0	0	8	37,370,000.00	3	6,050,000.00	37.5	16.19	3	6,050,000.00	7.5	1.34
17	06.01.04.002	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	jumlah dokumen pelaporan Capaian Keuangan	15	400,000,000.00	0	0	3	32,000,000.00	3	30,891,500.00	100	96.54	3	30,891,500.00	20	7.72
18	06.01.04.003	Penyusunan dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan	25	475,000,000.00	0	0	5	87,159,000.00	5	75,090,000.00	100	86.15	5	75,090,000.00	20	15.81

19	06.01.04.004	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	pameran pembangunan dan kembang api	20	1,000,000,000.00	0	0	4	71,367,800.00	2	24,850,000.00	50	34.82	2	24,850,000.00	10	2.49
20	06.01.04.005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	40	375,000,000.00	0	0	8	57,160,000.00	8	47,080,000.00	100	82.37	8	47,080,000.00	20	12.55
21	06.01.25.001	Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila dalam pencegahan Radikalisme Forum Kerukunan Antar Budaya, Raker PPWK, Sosialisasi GNRM,	150	4,000,000,000.00	0	0	5	124,996,000.00	5	116,324,900.00	100	93.06	5	116,324,900.00	3.33	2.91
22	06.01.25.002	Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan	Sosialisasi Bela Negara, Kemah Bela Negara, Raker FPK	125	4,400,000,000.00	0	0	4	69,777,500.00	4	68,617,200.00	100	98.34	4	68,617,200.00	3.2	1.56
23	06.01.26.001	Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Jumlah koordinasi kewaspadaan dini dan penanganan konflik	45	7,500,000,000.00	0	0	2	142,869,800.00	1	42,250,000.00	50	29.57	1	42,250,000.00	2.22	0.56
24	06.01.26.002	Monitoring Stabilitas Daerah	Jumlah rapat koordinasi stabilitas di Daerah	60	5,000,000,000.00	0	0	4	135,680,000.00	2	77,103,000.00	50	56.83	2	77,103,000.00	3.33	1.54
25	06.01.27.001	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Agama dan Sosial Kemasyarakatan	Pembinaan Pondok Pesantren, Rakor Rembuk Desa, Pembinaan Ormas, Doa Bersama, Rakor FKUB Kab/Kota	175	5,400,000,000.00	0	0	10	200,000,000.00	10	185,597,400.00	100	92.8	10	185,597,400.00	5.71	3.44
26	06.01.27.002	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	Jumlah rapat koordinasi P4GN	105	3,900,000,000.00	0	0	5	192,000,200.00	5	163,477,273.00	100	85.14	5	163,477,273.00	4.76	4.19
27	06.01.28.001	Fasilitasi Organisasi Politik (ORPOL) dan Pemantauan Pemilu/Pilkada	jumlah koordinasi orpol dan pemantauan	205	4,400,000,000.00	0	0	10	195,914,000.00	6	92,494,800.00	60	47.21	6	92,494,800.00	2.93	2.1
28	06.01.28.002	Pendidikan Budaya Politik	jumlah sosialisasi netralitas ASN, pemilih pemula, kaum perempuan dan media	130	4,000,000,000.00	0	0	7	104,495,600.00	7	99,680,000.00	100	95.39	7	99,680,000.00	5.38	2.49
Rata-Rata capaian kinerja %												89.2	80.87			14.23	10.96
Predikat kinerja												tinggi	tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Monitoring Faktor																	
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja				Rencana Aksi Program/Kegiatan Tahun 2020 dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Prov. Lampung													
Faktor penghambat pencapaian kinerja				-													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				-													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				Penataan anggaran yang sesuai dengan target rencana kerja dan pelatihan teknis dan non teknis masih perlu dilanjutkan pada tahun berikutnya													

Tabel II.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD				
NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	3	7	10	13	1	3	7	10	13
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				19,048,101,826					19,048,101,826
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				19,048,101,826					19,048,101,826
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	Persen	15,571,576,426	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	Persen	15,571,576,426
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	92.5	persen	143,918,500	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	92.5	persen	143,918,500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	101,184,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	101,184,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	22,182,300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	22,182,300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	laporan	20,552,200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	laporan	20,552,200
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi keuangan	90	persen	13,500,332,886	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi keuangan	90	persen	13,500,332,886
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	orang/ bulan	6,375,742,886	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	orang/ bulan	6,375,742,886
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	39	dokumen	7,080,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	39	dokumen	7,080,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	dokumen	22,414,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	dokumen	22,414,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	laporan	22,176,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	laporan	22,176,000

KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	92	persen	23,368,000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	92	persen	23,368,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		laporan	11,684,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		laporan	11,684,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapaoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	laporan	11,684,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapaoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	laporan	11,684,000
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	80	persen	19,910,000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	80	persen	19,910,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	181	orang/ hari/ kegiatan	19,910,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	181	orang/ hari/ kegiatan	19,910,000
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi umum	80	persen	1,251,078,200	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi umum	80	persen	1,251,078,200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	paket	14,574,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	paket	14,574,200
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	paket	345,505,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	paket	345,505,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan	12	paket	8,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan	12	paket	8,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	paket	25,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	12	paket	100,780,000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	12	paket	100,780,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	33,450,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	33,450,000
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	723,769,000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	723,769,000
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	77.5	persen	399,408,840	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	77.5	persen	399,408,840

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	200,408,840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	200,408,840
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	199,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	199,000,000
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	62.5	persen	233,560,000	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	62.5	persen	233,560,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	unit	185,170,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	unit	185,170,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8	unit	32,210,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8	unit	32,210,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		unit	16,180,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		unit	16,180,000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	25	Persen	993,347,800	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	25	Persen	993,347,800
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	25	Persen	993,347,800	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	25	Persen	993,347,800
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	dokumen	26,347,500	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	dokumen	26,347,500

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	24	dokumen	96,373,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	24	dokumen	96,373,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2740	orang	867,167,500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2740	orang	867,167,500
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka	15	laporan	3,459,800	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka	15	laporan	3,459,800
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	25	Persen	158,433,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	25	Persen	158,433,000
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25	Persen	158,433,000	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25	Persen	158,433,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	495	orang	136,833,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	495	orang	136,833,000

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15	laporan	21,600,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15	laporan	21,600,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	25	Persen	614,593,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	25	Persen	614,593,000
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	25	Persen	614,593,000	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	25	Persen	614,593,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1370	orang	592,993,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1370	orang	592,993,000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15	laporan	21,600,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15	laporan	21,600,000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	25	%	1,217,332,600	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	25	%	1,217,332,600

KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	25	Persen	1,217,332,600	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	25	Persen	1,217,332,600
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2	dokumen	100,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2	dokumen	100,000,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	950	orang	395,827,400	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	950	orang	395,827,400
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1200	orang	391,225,600	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1200	orang	391,225,600

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	15	laporan	4,133,600	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	15	laporan	4,133,600
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4	dokumen	326,146,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4	dokumen	326,146,000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	72.55	persen	492,819,000					
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	25	persen	492,819,000	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	25	persen	492,819,000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	dokumen	7,823,800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	dokumen	7,823,800

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	dokumen	12,617,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	dokumen	12,617,000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450	orang	182,778,700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450	orang	182,778,700
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1230	orang	283,399,500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1230	orang	283,399,500

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15	laporan	6,200,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15	laporan	6,200,000
--	---	----	---------	-----------	--	---	----	---------	-----------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengambil fokus mendukung Misi pertama RPJMD Provinsi Lampung periode 2019-2024 yaitu Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai dengan melaksanakan agenda kerja sebagai berikut :

1. Lampung Merawat Indonesia, dengan memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan
2. Lampung menuju bebas narkoba, dengan mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama.

Dalam melaksanakan misi ke-satu dan agenda kerja tersebut diatas, pokok – pokok program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya untuk memperkokoh penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan media masa, serta lembaga dan organisasi terkait;
2. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan kabupaten/kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum
3. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat,

penyalahgunaan narkoba, radikalisme dan masalah-masalah sosial lainnya

4. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Sedangkan arah kebijakan nasional bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2022 antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara Indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada

kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Lampung merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2022 antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial dengan Penguatan Timdu PKS
2. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila
3. Pelaksanaan Perda P4GN melalui, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN

B. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun tahun 2019–2024 menetapkan tujuan sebagai berikut : “***Meningkatnya budaya toleransi dan demokrasi masyarakat***”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019–2024, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : **“Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE -					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya budaya toleransi dan demokrasi masyarakat	Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama	Indeks hak-hak politik Provinsi Lampung	72,00	72,00	72,25	72,50	72,75	73,00
			Penurunan potensi konflik sosial di Provinsi Lampung	15%	15%	20%	20%	20%	20%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, tujuan, Sasaran dan Agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Rencana Kerja Tahun 2022 menetapkan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan pagu indikatif belanja langsung sebesar Rp. 19.048.101.826,00 (sembilan belas miliar empat puluh delapan juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah)) yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan rincian seperti tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV. 1

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2022

KODE REK	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
08	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				19.048.101.826
08 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				19.048.101.826
08 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	Persen	15.571.576.426
08 01 01 1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	92,5	persen	143.918.500
08 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	101.184.000
08 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	22.182.300

08	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	laporan	20.552.200
08	01	01	1.02		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi keuangan	90	persen	13.500.332.886
08	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	orang/ bulan	6.375.742.886
08	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	39	dokumen	7.080.000.000
08	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	dokumen	22.414.000
08	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	laporan	22.176.000
08	01	01	1.03		KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	92	persen	23.368.000
08	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		laporan	11.684.000
08	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	laporan	11.684.000
08	01	01	1.05		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	80	persen	19.910.000
08	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	181	orang/ hari/ kegiatan	19.910.000
08	01	01	1.06		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi umum	80	persen	1.251.078.200
08	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	paket	14.574.200
08	01	01	1.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	paket	345.505.000
08	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan	12	paket	8.000.000
08	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	paket	25.000.000

08	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	12	paket	100.780.000
08	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	33.450.000
08	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	723.769.000
08	01	01	1.08		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	77,5	persen	399.408.840
08	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	200.408.840
08	01	01	1.08	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	199.000.000
08	01	01	1.09		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	62,5	persen	233.560.000
08	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	unit	185.170.000
08	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8	unit	32.210.000
08	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		unit	16.180.000
08	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	25	Persen	993.347.800
08	01	02	1.01		KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DI BIDANG IDEOLOGI DAN KARAKTER KEBANGSAAN	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	25	Persen	993.347.800
08	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	dokumen	26.347.500

08	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	24	dokumen	96.373.000
08	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2740	orang	867.167.500
08	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	laporan	3.459.800
08	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	25	Persen	158.433.000
08	01	04	1.01		KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25	Persen	158.433.000
08	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	495	orang	136.833.000
08	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15	laporan	21.600.000

08	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	25	Persen	614.593.000	
08	01	05	1.01	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	25	Persen	614.593.000	
08	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1370	orang	592.993.000
08	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15	laporan	21.600.000
08	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	25	%	1.217.332.600	
08	01	06	1.01	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	25	Persen	1.217.332.600	
08	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2	dokumen	100.000.000

08	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	950	orang	395.827.400
08	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1200	orang	391.225.600
08	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	15	laporan	4.133.600
08	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4	dokumen	326.146.000
08	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	72,55	persen	492.819.000

08	01	03	1.01		KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	25	persen	492.819.000
08	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	dokumen	7.823.800
08	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	dokumen	12.617.000
08	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450	orang	182.778.700

08	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1230	orang	283.399.500
08	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15	laporan	6.200.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen rencana tahunan yang didalamnya termuat program, kegiatan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Didalam RENJA ini juga disampaikan indikator kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2022 sebagai salah satu tolok ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RENJA ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022.

Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung hendaknya berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini. Selain itu, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Lampung. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan pendekatan secara formal maupun nonformal dengan para stakeholders. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan

manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan.

Bandar Lampung,

2021

KEPALA BADAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more detailed signature.

Drs. M. FIRSADA, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001